

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 1985:1).

Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah dapat di lihat dari segi pendapatan suatu daerah, tujuan utama dari pendapatan daerah adalah untuk mencapai sebuah peningkatan perekonomian, ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kegiatan perekonomian suatu daerah yang dapat menghasilkan pendapatan masyarakat dalam waktu tertentu.

Perubahan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dalam suatu daerah digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan pendapatan indeks harga konstan dan indeks harga berlaku dari tahun ke tahun. Jadi dalam perubahan nilai pendapatan disebabkan oleh perubahan tingkat pertumbuhan

ekonomi. Rote Ndao dengan potensi sumber daya alam (Perikanan, pertanian dan peternakan) dan pendapatan yang dimiliki, dapat menjadi modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari segi pembangunan ekonomi dan suatu negara atau daerah. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan proses pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan tanda adanya peningkatan perekonomian sebuah daerah. Dalam sebuah daerah pembangunan ekonomi merupakan gambaran sebuah perekonomian di daerah.

(Todara M.P, 2000) pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

Tabel 1.1**Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009-2018 (Ribu Rupiah)**

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Ribu Rupiah)
1	2009	1,246,016,10
2	2010	1,373,760,30
3	2011	1,514,477,80
4	2012	1,685,608,38
5	2013	1,890,299,60
6	2014	2,161,712,70
7	2015	2,404,822,55
8	2016	2,635,282,43
9	2017	2,883,900,16
10	2018	3,136,403,68

Sumber BPS Kabupaten Rote Ndao, 2020

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.. Hal ini terindikasi dari besarnya kontribusai sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada pada kisaran 43,01-47,94%. Selain sektor pertanian terdapat dua sektor yang mempunyai kontribusi yaitu sektor jasa dan perdagangan, Restoraan dan Hotel diatas 16%, sedangkan sektor-sektor yang lain kontribusinya masih dibawah 5%. Kondisi struktur perekonomian, relatif belum mengalami perubahan signifikan, meskipun tren pergeseran sudah mulai Nampak. Dalam sepuluh tahun terakhir, struktur ekonomi Rote Ndao tetap bergantung pada tiga sektor utama, yaitu: Pertanian, PHR, dan Jasa.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 11 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Untuk membiayai daerah anggaran ini pemerintah pusat dapat membantu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, selain itu pemerintah daerah dapat berusaha sendiri dengan meningkatkan pajak asli daerah. (Halim & Abdullah, 2006).

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 tahun 2004. Desentralisasi Fiskal yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu pajak daerah, dana bagi hasil, dan Dana Alokasi umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu (satu tahun anggaran) dimasa yang akan datang. (Sinurat & Panjaitan, 2017)

Sinurat & Panjaitan.(2017) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan instrument penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Struktur penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan sistem akuntansi berbasis aktual. Untuk sinkronisasi dan menghindari adanya konversi, maka struktur penganggaran mengalami perubahan dari struktur yang selama ini diterapkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menjadi struktur yang terdiri dari : anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen pendapatan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Fungsi Utama dari PAD adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintah daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Berdasarkan UU No33Tahun2004, DanaAlokasi Umum adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensidaerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiskalgap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Tabel 1.2

**Realisasi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Rote Ndao tahun 2010-2018 (Ribuan Rupiah)**

No	Tahun	Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)
1	2010	207.112.494.000	12.076.428.362
2	2011	213.543.519.800	12.751.901.733
3	2012	236.218.756.000	16.446.623.109
4	2013	284.550.454.000	16.066.719.834
5	2014	345.248.896.000	17.646.843.270
6	2015	361.623.423.000	25.072.666.421
7	2016	384.157.631.000	27.089.991.977
8	2017	441.682.656.000	28.842.548.099
9	2018	438.816.702.000	49.093.660.595
10	2019	445.782.708.000	27.926.128.902

Sumber BPS Kab Rote Ndao, 2020

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Rote Ndao selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun sedangkan, pada tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini bermaksud mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan

Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2009-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian-penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembangunan yang ada di daerah, sehingga masyarakat bisa ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.